

KOREA DAN JEPANG : ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI MASA DEPAN

Rahmi Putri¹⁾, Rusdina²⁾, Azwar Ananda³⁾, Nurhizrah Gistituati⁴⁾

¹⁾Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci

^{2),3),4)}Program Doktor Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang

¹email: rahmiputri102@yahoo.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 24 Juni 2023

Revisi, 3 Juli 2023

Diterima, 23 Juli 2024

Publish, 15 Januari 2024

Kata Kunci :

Jepang

Korea

Sistem Pendidikan, TIK

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana kesamaan sistem pendidikan Jepang dan Korea Selatan muncul sepanjang abad ke-20 dan menyelidiki alasan di balik perbedaan mereka di tahun 1990-an dengan munculnya kebijakan TIK dalam pendidikan. Menggunakan analisis naratif dan perbandingan berorientasi kasus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana elemen politik dan ekonomi Jepang dan Korea Selatan memengaruhi cara mereka mengembangkan sistem pendidikan yang serupa dan bagaimana perubahan elemen tersebut kemudian mengalihkan arah dari masing-masing sistem. Sistem pendidikan Jepang dan Korea Selatan memiliki kesamaan karena kombinasi modernisasi, kolonisasi, dan konservatisme. Namun, perubahan lanskap politik dan ekonomi Korea Selatan menghasilkan sistem yang siap untuk reformasi dramatis, sementara Jepang mempertahankan kelanjutan pihak pembuat keputusan sebelumnya, yang mengakibatkan perubahan yang kurang aktif. Hasil ini berkontribusi pada perbedaan sistem pendidikan dengan munculnya kebijakan TIK. Pembuat kebijakan dapat melihat bagaimana sistem pendidikan yang serupa dapat berubah dengan munculnya teknologi baru dan faktor apa yang dapat mempengaruhi adopsi teknologi pendidikan. Studi ini memperluas studi yang membandingkan Jepang dan Korea Selatan ke dalam bidang pendidikan. Studi ini mengilustrasikan alasan komprehensif di balik persamaan dan perbedaan yang terlihat antara sistem pendidikan Jepang dan Korea Selatan.

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Nama : Rahmi Putri

Afiliasi: Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Email: rahmiputri102@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan sistem pendidikan setiap bangsa secara bersinggungan dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bangsa dengan tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Penting untuk menyadari kebutuhan untuk melakukan analisis komparatif terhadap sistem pendidikan di berbagai negara dalam upaya untuk membandingkan sistem pendidikan saat ini dengan sistem pendidikan lainnya (Putra, 2017).

Penelitian ini merupakan perbandingan kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan publik di Jepang dan Republik Korea pada akhir abad ke-20. Perbandingan antara Jepang dan Korea selama ini penting karena kedua negara mengembangkan gaya sistem pendidikan publik yang serupa sepanjang abad ke-20, tetapi pada titik balik abad ke-21, menerapkan TIK dengan cara yang sama sekali berbeda (Riyana, 2008).

dilihat dengan munculnya teknologi baru. Dengan demikian, pengaruh unsur politik dan ekonomi dalam adopsi kebijakan baru untuk pendidikan dapat diamati. Pengamatan tersebut dapat berdampak pada kebijakan masa depan untuk reformasi pendidikan sebagai studi mendalam dan pertimbangan untuk dampak sosial dari elemen politik dan ekonomi membantu dalam mengembangkan rencana dan strategi untuk mengadopsi teknologi baru ke dalam sistem pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Taufiqurakhman, 2014)

Meskipun ada penelitian yang membandingkan sistem pendidikan Asia dan non-Asia, namun tidak banyak yang membandingkan sistem pendidikan berbasis TIK di Jepang dan Korea. Saat membandingkan TIK di Jepang atau Korea, sebagian besar studi mengandalkan paralel internasional daripada internal. Studi oleh (Sánchez et al., 2011) di University of Chile membandingkan Korea dan Chile, menyoroti potensi kerjasama antara kedua negara dan pelajaran yang dapat dipelajari Chile dari praktik TIK pendidikan Korea. (Roh, 2004) membandingkan hubungan pendidikan warga dengan TIK antara Australia dan Korea, dan kemudian, (Kozma, 2008) menerbitkan karya yang membandingkan kebijakan TIK untuk pendidikan antara Korea, Taiwan, dan Singapura. Jepang juga dibandingkan dengan Singapura dalam studi oleh (Vallance, 2008), yang menyoroti banyak prospek dan tantangan TIK untuk Jepang. Selain itu, (Elwood & MacLean, 2009) melakukan survei dengan siswa Jepang dan Kamboja untuk mengamati perbedaan persepsi TIK. Akhirnya, Sebuah tim peneliti membandingkan sikap guru Jepang dan Amerika Serikat sehubungan dengan TIK (Kusano et al., 2013).

Meskipun kebijakan TIK Jepang dan Korea untuk pendidikan telah dibandingkan dengan negara lain, masih ada kebutuhan untuk perbandingan yang lebih langsung antara Jepang dan Korea dalam bidang studi ini. Hanya sedikit penelitian yang sebelumnya membandingkan kebijakan TIK untuk pendidikan di kedua negara. Dalam surat singkat yang diterbitkan di Japan Society for Educational Technology, (Osugi Shigeki, 2005), mengklaim bahwa sementara Jepang dan Korea memiliki kepercayaan dan motivasi mendasar yang sebanding, Korea telah membuat kemajuan lebih dalam menerapkan kepercayaan tersebut.

Hal ini selanjutnya disadari oleh (Rha & Yoshida, 2005) dalam perbandingan naratif yang diterbitkan dalam Education Technology International. Menurut penelitian tersebut, dua faktor perbedaan utama antara Jepang dan Korea adalah infrastruktur dan program pelatihan guru. Studi semacam itu menyoroti kemajuan yang dibuat Korea selama pergantian abad ke-21 tentang kebijakan TIK untuk pendidikan. Namun, perbandingan tersebut tidak membahas awal TIK menjadi faktor pendidikan,

mulai dari tahun 1990-an. Meneliti keadaan dari tahun 1990-an adalah penting karena menjadi jendela wawasan perbedaan sistem pendidikan serupa yang terjadi dengan penerapan TIK. Hal ini dapat memberikan alasan di balik awal dan stabilnya TIK di Korea jika dibandingkan dengan Jepang pada 1990-an dan selanjutnya berkontribusi pada rencana masa depan TIK di kedua negara.

Dari latar belakang diatas maka Penelitian ini akan fokus pada pertanyaan “Apa yang menyebabkan pemerintah Jepang dan Korea menggunakan sistem pendidikan yang sama menjelang akhir abad ke-20 dan Bagaimana iklim politik dan ekonomi pada akhir abad ke-20 berkontribusi terhadap perbedaan TIK dalam pendidikan antara Jepang dan Korea?”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana kesamaan sistem pendidikan Jepang dan Korea Selatan muncul sepanjang abad ke-20 dan menyelidiki alasan di balik perbedaan mereka di tahun 1990-an dengan munculnya kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pendidikan. Hal ini tentunya menjadi referensi bagi pendidikan di Indonesia bagaimana mengembangkan sistem pendidikan yang serupa dan bagaimana hal tersebut menjadi elemen penting bagi tatanan sistem pendidikan yang ada saat ini, sehingga sisi baik dari sistem pendidikan kedua negara ini dapat dijadikan percontohan demi kemajuan sistem pendidikan yang sudah ada.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis perkembangan kebijakan pendidikan di Jepang dan Korea sejak awal abad ke-20 hingga pendekatan kedua negara tersebut mulai berbeda pada awal milenium baru. Untuk Kepustakawanan Internasional dan Komparatif, berpendapat bahwa strategi berorientasi kasus dapat membantu menjelaskan hubungan yang kompleks, yang mungkin melibatkan banyak penyebab lintas negara dari waktu ke waktu. Hubungan kompleks yang dipertimbangkan untuk penelitian ini mencakup sejumlah klausul dalam faktor politik, ekonomi, dan sosial yang menambah mengapa Jepang dan Korea mengambil jalan yang berbeda pada 1990-an, meskipun pada saat itu serupa. Menurut (Ragin, 2014), metode ini cocok untuk kronologi sejarah, seperti yang ditunjukkan oleh garis waktu yang diperoleh dalam penelitian ini.

Saat melakukan studi sejarah komparatif, sejarawan biasanya membagi sumber mereka menjadi tiga kategori: primer, sekunder, dan tersier. Demikian pula, informasi dari ketiganya digunakan untuk melakukan penelitian sejarah. Peneliti menggunakan berita dan dokumen sumber utama untuk menempatkan peristiwa pada waktunya, dan artikel ilmiah untuk mempelajari lebih lanjut tentang konteks dan konsekuensi potensial dari peristiwa tersebut.

Untuk melacak perkembangan sejarah, narasi politik, ekonomi, dan sosial dikontraskan. Tujuan

utama cerita tersebut adalah untuk menunjukkan seberapa jauh kemajuan Korea dibandingkan dengan Jepang. Elemen dan kesimpulan dari kedua kisah tersebut digunakan untuk menjelaskan kepergian sistem pendidikan Korea yang cepat dan dramatis dibandingkan dengan Jepang. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di ruang kelas merupakan prioritas reformasi di kedua negara. Jika disatukan, ketiga cerita ini menjelaskan mengapa Korea dapat mulai mempersiapkan TIK lebih dulu dari Jepang dan mengapa penerapan rencana tersebut lebih berhasil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Bersama melalui Sejarah

Selama modernisasi sektor publik di Jepang dan Korea, sistem pendidikan publik mengalami perubahan besar dan penyempurnaan yang menghasilkan sistem serupa yang dikembangkan di kedua negara.

Modernisasi Pendidikan Jepang

Sejak tahun 1868, para pemimpin periode Meiji memprioritaskan westernisasi sebagai sarana modernisasi Jepang. Pada tahun 1871, misi Iwakura (Iwakura Shisetsudan) memainkan peran penting dalam memperkenalkan sekolah gaya Barat ke Jepang. Konsep tradisional Asia dibuang demi varian Barat yang dominan dalam sistem pendidikan. Tapi itu bukan pemutusan total dengan tradisi; menjelang akhir abad ke-19, sistem pendidikan Jepang telah berkembang menjadi sintesis manajemen barat dan etika konvensional Asia (Shibata, 2004).

Pada 1980-an, Jepang mulai menyadari perlunya menjadi fleksibel untuk internasionalisasi di abad ke-21. Perdana Menteri Yasuhiro Nakasone memulai gerakan reformasi pendidikan pada tahun 1985 yang membawa banyak elemen baru pelatihan guru dan mata pelajaran ke sekolah dan ruang kelas (Hood, 2003). Dewan Pendidikan Luar Biasa (臨時教育審議会, Rinji Kyoiku Shingikai) bertanggung jawab atas perubahan sistem pendidikan tersebut dari tahun 1985 hingga 1987 tetapi tidak terus mengawasi perubahan yang akan menjadi masalah di tahun 1990-an. Pengelolaan kelas dan pengoperasian sekolah itu sendiri tidak akan berubah, meskipun pernyataan misi dan kegiatan sekolah dimodifikasi untuk memenuhi saran dewan (Schoppa, 2002). Aspek kebijakan pendidikan juga akan tetap tidak berubah sepanjang akhir abad ke-20 (Beauchamp, 1991).

Modernisasi Pendidikan Korea

Tahun-tahun terakhir Dinasti Chosun dan tahun-tahun awal pemerintahan kekaisaran Jepang menyaksikan perkembangan sistem pendidikan publik pertama yang dimodernisasi di Korea yang sebanding dengan sistem yang ada saat ini. Reformasi Kabo (juga dikenal sebagai Reformasi Gabo), yang dimulai oleh kabinet pro-Jepang pada tahun 1895, menciptakan sebagian layanan publik menyerupai Jepang melalui westernisasi. Komponen penting lainnya dari transformasi adalah perubahan pada sistem pendidikan (Lee & Yi, 2000).

Pemerintah Jepang menggunakan pendidikan publik sebagai sumber untuk mengontrol semenanjung Korea dan melalui berbagai reformasi dan penyempurnaan sistem (Mason et al., 1989). Fokus diberikan untuk memberikan pendidikan yang sama kepada penduduk kolonial Korea seperti penduduk Jepang dan pada dasarnya, menjadikan mereka orang Jepang dalam nilai dan gagasan mereka.

Warga Korea Kolonial menerima tingkat pendidikan yang sama dengan warga negara Jepang berkat Ordonansi Pendidikan tahun 1922. Ordonansi Pendidikan tahun 1938 bertujuan untuk mengasimilasi orang Korea ke dalam budaya Jepang dan sekolah Korea menjadi identik dengan sekolah Jepang. Unsur-unsur ikatan kelas, sistem pendidikan yang seragam, dan ujian masuk menjadi warisan kuat yang bertahan hingga sistem pendidikan Korea merdeka (Seth, 2002). Selain itu, budaya sekolah dan elemen logistik sekolah umum terbawa ke sekolah umum Korea setelah memperoleh kemerdekaan dari Jepang (McGinn et al., 1980).

Menyusul berakhirnya pendudukan Jepang pada tahun 1945, Amerika Serikat berperan dalam pengembangan sistem pendidikan baru. Seperti di Jepang, sekolah disusun dengan pendidikan dasar 6 tahun diikuti oleh 3 tahun sekolah menengah pertama dan 3 tahun sekolah menengah atas (Mason et al., 1989). Perang Korea membawa kehancuran dan kekacauan di negara tersebut tetapi Korea mulai melihat stabilitas pertumbuhan ekonomi setelah kudeta militer oleh Presiden Park Chung Hee (H.-A. Kim, 2004). Presiden Park dididik dalam sistem pendidikan Jepang dan sangat menghormati militer Jepang (H.-A. Kim, 2004). Dia mencontoh kebijakan dari banyak aspek Demokrasi Daisho selama kekaisaran Jepang dan membentuk identitas modern bangsa. Karena model transisi ekonomi Korea dari tekstil ke industri berat sangat mirip dengan Jepang, sistem pendidikan juga dirancang untuk mendukung agenda ekonomi (Seth, 2002). Oleh karena itu, warisan sistem pendidikan Jepang berlanjut selama beberapa dekade setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua melalui agenda pendidikan dan kebijakan rezim pertama di Korea (Seth, 2002).

Perbandingan Antara Korea dan Jepang Dalam Sistem Pendidikan

Sistem Pendidikan Di Korea Selatan

Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi adalah tiga tahap yang dilalui pendidikan di Korea Selatan. Usia siswa digunakan untuk membagi tingkat sekolah. Menurut informasi yang diberikan oleh The Learning Curve-Pearson PLC pada tahun 2014, Korea Selatan menduduki peringkat pertama. Perhatian pemerintah Korea Selatan terhadap bidang pendidikan dengan menyediakan anggaran pendidikan yang cukup besar melalui alokasi anggaran pendidikan secara tidak langsung turut menyukseskan negara Korea Selatan sebagai sistem pendidikan nomor satu jika dilihat dari data. Usia

digunakan dalam sistem pendidikan Korea Selatan, bukan informasi, nilai, atau ujian. Selain ditentukan oleh komponen umur (*age*), bulan lahir juga berperan. Sistem pendidikan Korea Selatan sebanding dengan Indonesia (Riyana, 2008), yakni 6 tahun untuk sekolah dasar (SD), 3 tahun untuk sekolah menengah pertama (SMP), 3 tahun untuk sekolah menengah atas (SMA) dan universitas

Menurut (Riyana, 2008), sistem pendidikan Korea Selatan umumnya terdiri dari empat tingkatan: sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan pendidikan tinggi. Kelas 1-6 (SD), 7-9 (SLTP), 10-12 (SLTA), dan 13-16 (program pendidikan tinggi/S1), serta program pasca sarjana (S2/S3), diselenggarakan dengan empat jenjang pendidikan tersebut. Berikut visualisasi tingkat pendidikan :

1. Anak-anak berusia antara 6 dan 11 tahun harus mengikuti sekolah dasar selama enam tahun penuh; 99,8% lulusan sekolah dasar dan 0,2% putus sekolah dasar.
2. SMP adalah perpanjangan SD selama tiga tahun untuk anak-anak berusia antara 12 dan 14 tahun.
3. Setelah itu, siswa dapat memilih antara sekolah menengah umum dan kejuruan di kelas 10-11 dan 12. Pertanian, perdagangan, perikanan, dan teknik semuanya tercakup dalam lembaga kejuruan. Selain itu, ada sekolah komprehensif, yang menggabungkan pendidikan umum dan profesional dan menawarkan pilihan untuk mengejar pendidikan lebih lanjut di perguruan tinggi atau universitas junior (*Senior College*).
4. Kelas akademik atau pendidikan tinggi di perguruan tinggi junior atau senior untuk siswa kelas 13 sampai 16, diikuti oleh sekolah pascasarjana untuk gelar master atau doctoral.

Pembuatan undang-undang pendidikan adalah salah satu keputusan yang dibuat oleh Dewan Nasional Republik Korea pada tahun 1948. Sehubungan dengan itu, tujuan pendidikan Korea Selatan (Riyana, 2008) seperti mendorong setiap orang untuk menghormati kedaulatan nasional dan merasakan identitas nasional, meningkatkan identitas setiap warga Negara, menjunjung tinggi prinsip persaudaraan global, memperoleh kemerdekaan, dan mengadvokasi negara yang demokratis dan kesejahteraan semua orang, menumbuhkan kebanggaan nasional.

Sistem pendidikan Korea Selatan terkait erat dengan metode yang digunakan oleh negara tersebut. Berikut adalah beberapa model treatment yang dilakukan taman Kanak-Kanak "Youchiwon" untuk anak usia 3 sampai 6 tahun. Pihak swasta dari pemerintah terus mendampingi, mengawasi, dan memperhatikan secara seksama pengelolaan taman kanak-kanak ini di tingkat pra sekolah.

Ada hubungan antara kemajuan ekonomi dan kemajuan pendidikan. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mendorong kebijakan ekonomi dalam hal kemajuan industri. Akibat pertumbuhan

industri yang disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan, maka ia menjadi mesin ekonomi yang kuat.

PAUD negeri dan swasta menggunakan kurikulum yang sama, yang menekankan pada pengajaran siswa bagaimana mandiri, kreatif, dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar serta bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari. Calon siswa terlebih dahulu diajak mengamati lingkungan seolah-olah merupakan langkah selanjutnya di tingkat pra-sekolah dasar.

Pendidikan di Korea Selatan dipraktikkan dengan sangat ketat karena ada penekanan yang kuat pada disiplin. Akibatnya, siswa dapat menghadiri kelas dari jam 8 pagi hingga tengah malam sesekali karena mereka melanjutkan pendidikan di jalur nonformal setelah menyelesaikan pendidikan resmi.

Sistem Pendidikan Di Jepang

Mengenai bagaimana masyarakat Jepang berhasil bertransisi dari masyarakat industri tradisional ke masyarakat industri modern, perkembangan budaya Jepang secara tidak langsung berdampak pada perkembangan pendidikan di Jepang. Dalam perkembangannya, masyarakat Jepang melakukan reformasi dan mempersiapkan diri dari datangnya pengaruh budaya lain. Masyarakat Jepang dikenal sebagai masyarakat yang berhasil berkembang dari masyarakat industri tradisional menjadi modern dengan caranya sendiri. Keberhasilan beradaptasi dengan model pembaharuan yang berasal dari luar dan kondisi masyarakat Jepang yang berusia ribuan tahun memiliki kekuatan yang memungkinkan untuk bertahan, bahkan menjadi masyarakat modern kelas satu di dunia (Dimiyati, 1988) seperti keinginan kuat untuk memperoleh keterampilan baru dan mengadopsi praktik yang akan memajukan budaya Jepang, mengagumi konsep asing sambil dengan hati-hati memilih yang cocok untuk keadaan Jepang, menempatkan nilai lebih pada kemampuan dan pencapaian seseorang daripada latar belakang atau keturunannya.

Selain itu, transformasi Jepang terbantu oleh warisan sastra, pandangan filosofis, penggunaan bahasa tulisan, kebebasan dari buta huruf, dan pengejaran pengetahuan di semua lapisan masyarakat. Jepang menempati peringkat kedua di dunia untuk pengembangan sistem pendidikannya, menurut statistik yang disediakan oleh The Learning Curve - Pearson PLC pada tahun 2014. Dengan mengalokasikan 9,58% dari pengeluaran negara tahunan untuk pendidikan dan rasio guru-ke-siswa sebesar 17,09, pemerintah Jepang telah menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan.

Dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, teknologi, politik, pendidikan, seni, olahraga, dan komunikasi massa, masyarakat Jepang maju dan berkembang pesat. Jepang sering dijadikan studi banding karena perkembangan sistem negara yang pesat. Salah satu kesimpulan ini didasarkan pada penelitian komparatif yang dilakukan di Amerika

Serikat. Jepang (Shago Ichikawa, Victor N. Kobayashi, dan Morkazt Ushioji) dan Amerika Serikat (William K. Cummings, Erward R Beauchamp) mempresentasikan temuan studi banding di bidang pendidikan (Dimiyati, 1988) keinginan yang luar biasa untuk belajar dari, memilih, dan mengadopsi unsur-unsur budaya lain untuk menciptakan budaya mereka sendiri merupakan tradisi yang kuat dalam masyarakat Jepang, orang Jepang sangat percaya bahwa meningkatkan kesejahteraan diri sendiri atau kolektif hanya membutuhkan pembelajaran. Guru-guru Jepang memiliki komitmen yang kuat dan tak tergoyahkan untuk keberhasilan siswa perempuan. Sistem pendidikan sosial Jepang secara konsisten menekankan pentingnya tiga faktor: guru, siswa, dan masyarakat luas diantaranya kekayaan sumber daya penduduk yang sangat terampil dihasilkan oleh sekolah wajib, sistem ujian, dan standar nasional yang seragam, sekolah Jepang menawarkan 240 hari pengajaran per tahun dibandingkan dengan 180 hari di sekolah Amerika, disiplin diri dan etika kerja keras ditekankan di institusi Jepang, masyarakat Jepang memanfaatkan media untuk mempromosikan kebiasaan belajar. Buku teks, surat kabar, majalah, radio, dan televisi adalah contoh media massa yang digunakan untuk meningkatkan pengajaran sosial dan akademik.

Peraturan pendidikan Jepang dapat dibagi menjadi dua zaman, yaitu sebelum dan sesudah Perang Dunia II (Shobahiya, 2008). Reskrip Kerajaan tentang Pendidikan adalah pendekatan pendidikan yang dominan sebelum konflik. Dikatakan bahwa leluhur kaisar masa lalu mendirikan kekaisaran berdasarkan prinsip-prinsip nilai-nilai yang luas dan abadi dan tertanam kuat di dalamnya. Materi pelajaran digabungkan dengan cara yang indah yang menggambarkan pengabdian dan kepatuhannya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Itu adalah kecemerlangan kaisar, yang juga dia kelola dengan cara yang bijaksana. Pendidikan harus mampu melabuhkan seseorang dengan kokoh kepada orang tua, suami istri dalam keharmonisan, sebagai sahabat sejati, berterus terang dan berakal sehat, menunjukkan kasih sayang kepada semua pihak, serta belajar dan mengamalkan seni. Mulai tanggal 3 November 1946, konstitusi baru Jepang menetapkan kebijakan pendidikannya, mendasarkannya pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, jaminan kebebasan berpikir dan hati nurani, kebebasan beragama, kebebasan akademik, dan hak setiap orang untuk menerima pendidikan yang sesuai dengan pendidikan.

Struktur dasar pendidikan secara keseluruhan ditetapkan atas dasar 6-3-3-4 pada bulan Maret 1947 melalui Peraturan Pendidikan Nasional (UU Pendidikan Sekolah), disertai tujuan khusus pada setiap jenjang menurut Abd. Klaim Rachman Assegaf (2003) dalam (Shobahiya, 2008), pada Maret 1947 mulai berlaku. Perintah Kaisar tentang Pendidikan dan Hukum Dasar Pendidikan sangat berbeda dalam

filosofi yang mendasarinya. Misalnya, bagaimana masyarakat berinteraksi dengan pemerintah.

Dalam Imperial Rescript on Education disebutkan bahwa “Setiap warga memiliki kewajiban untuk mengembangkan daya intelektual dan moral mereka, melaksanakan hukum dan mempersembahkan keberaniannya deminegara untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan istana kaisar”. Sedangkan dalam Fundamental Law of Education disebutkan bahwa, “Setiap warga memiliki kesempatan yang sama menerima pendidikan menurut kemampuan mereka, bebas dari diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, status sosial, posisi ekonomi, asal usul keluarga, bantuan finansial, bagi yang memerlukan, kebebasan akademik, dan tanggung jawab untuk membangun negara dan masyarakat yang damai”. Kedua pandangan tersebut juga berbeda pendapat tentang tujuan akhir pendidikan. Menurut Reskrip Kerajaan tentang Pendidikan, kunci untuk mencapai keharmonisan sosial adalah mengajar setiap orang untuk mencintai dan menghormati orang tua mereka. Menurut Undang-undang Dasar Pendidikan, sekolah seharusnya membantu siswa tumbuh sebagai manusia seutuhnya, menghormati keyakinan mereka sendiri, dan menumbuhkan pola pikir mandiri. Prinsip-prinsip pendidikan di Jepang (Ilmu Pendidik, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Legalisme: Pendidikan di Jepang tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan melegitimasi hak setiap orang atas pendidikan yang bebas dari prasangka berdasarkan suku, kepercayaan, ras, atau keanggotaan antarkelompok.
2. Administrasi Partisipatif: Negara membuka kesempatan bagi siapa saja untuk mengenyam pendidikan dengan biaya yang masih terjangkau oleh masyarakat luas. Dengan menawarkan hibah kepada siswa yang layak atau berbakat, sistem pendidikan Jepang mencoba untuk dapat diakses secara finansial oleh semua orang.
3. Netralitas: Pendidikan di Jepang diberikan kepada semua siswa pada berbagai tingkat pendidikan dengan tetap menekankan kesetaraan setiap siswa tanpa membedakan berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, suku, agama, ras, atau latar belakang keluarga.
4. Modifikasi dan penentuan persyaratan pendidikan: Setiap siswa diajar pada tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya.
5. Desentralisasi: Pemerataan distribusi kebijakan pendidikan dari pemerintah nasional ke semua sekolah di seluruh negeri untuk memungkinkan pemantauan yang tepat terhadap pertumbuhan dan kemajuan sistem.

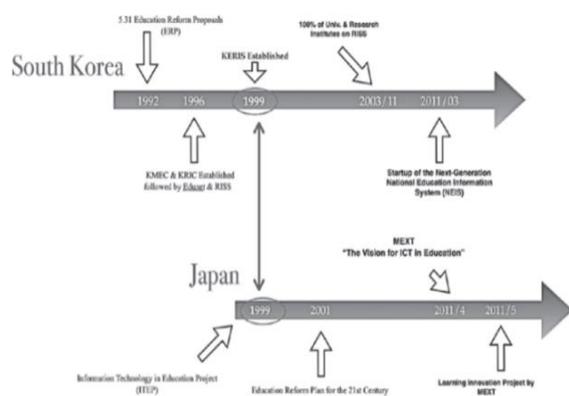
Tujuan pendidikan di Jepang adalah “Pendidikan harus bertujuan untuk pengembangan penuh kepribadian dan berusaha untuk memelihara warga, suara dalam pikiran dan tubuh, yang dijiwai

dengan kualitas yang diperlukan bagi mereka yang membentuk negara dan masyarakat yang damai dan demokratis.”

Tujuan pendidikan Jepang adalah mencapai pengetahuan dan budaya yang luas, mengembangkan tubuh yang sehat, dan menumbuhkan kepekaan dan rasa moralitas yang kaya, pengembangan keterampilan pribadi, dorongan semangat kemandirian dan otonomi, dan penekanan pada hubungan antara karir dan kehidupan sehari-hari, mempromosikan rasa tanggung jawab sosial, menghormati keadilan, kerja sama antar manusia, dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mempromosikan rasa hormat terhadap tradisi dan budaya, cinta bangsa dan wilayah yang melestarikannya, rasa hormat terhadap bangsa lain, dan sikap yang berkontribusi pada perdamaian dunia dan pertumbuhan komunitas global.

Karena prakarsa untuk pendidikan masa depan mengambil pendekatan yang sangat berbeda, terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pendidikan Jepang dan Korea mulai tahun 1990-an dan berlanjut hingga awal abad ke-21. Sekolah-sekolah Jepang sebagian besar tetap tidak berubah meskipun fakta bahwa perubahan sosial mulai terjadi, memaksa sekolah untuk menerapkan banyak inisiatif dan perubahan dalam cara guru mendekati kelas dan pelatihan yang dilakukan oleh para tenaga pengajar (Aspinall, 2001).

Sebagai perbandingan, Presiden Kim Yong Sam meluncurkan agenda pendidikan baru melalui Komisi Presiden untuk Reformasi Pendidikan (PCER), dan sistem pendidikan Korea mengalami perubahan yang signifikan pada saat yang sama negara menjadi sepenuhnya demokratis (Seth, 2002). Ini menunjukkan perbedaan mencolok antara sistem pendidikan kedua negara. Meskipun perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi di Korea selama tahun 1990-an menyebabkan perubahan drastis, perbedaan ini menjadi sangat jelas dengan peran yang dimainkan oleh TIK



Gambar 1. Timeline TIK Jepang dan Korea Selatan dalam Pendidikan

Peran TIK di kedua negara

Perbedaan yang terlihat dalam kebijakan pendidikan Jepang dan Korea tahun 1990-an sangat berkaitan dengan penerapan TIK ke dalam sistem

pendidikan publik. Gambar 1 menggabungkan semua upaya besar oleh kedua negara dan mengilustrasikan perbedaan sifat TIK yang memasuki sistem pendidikan kedua negara. Kedua negara mulai merencanakan munculnya teknologi baru untuk sekolah tetapi melakukannya dengan cara yang berbeda.

Dari tahun 1990-an hingga 2000-an, Jepang mengalami sejumlah inisiatif dan perubahan. Saat ini, strategi baru sedang diterapkan yang melibatkan koordinasi dua kementerian pemerintah, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi (MIC) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi (MEXT).

Di sisi lain, Korea telah mengalami lebih sedikit perubahan dalam rencana dan inisiatif yang dikembangkan pada 1990-an dan telah memanfaatkan Korea Education and Research Information Service (KERIS) sebagai satu-satunya kantor untuk menerapkan TIK ke dalam pendidikan sejak didirikan hingga hari ini.

1. TIK untuk Pendidikan di Jepang

Kebutuhan siswa untuk memiliki "kemampuan abad ke-21" muncul di Jepang, memicu diskusi tentang reformasi (Bjork & Tsuneyoshi, 2005). Meskipun tidak secara khusus berfokus pada TIK, (Fujita, 2000) menyatakan dalam *The American Sociologist* bahwa menyesuaikan pendidikan umum dengan kebutuhan era informasi, globalisasi, dan internasionalisasi merupakan perhatian yang signifikan. MEXT mulai merencanakan inisiatif untuk mengimplementasikan TIK ke dalam pendidikan dengan Proyek Teknologi Informasi dalam Pendidikan (ITEP) menjadi langkah maju yang nyata pada tahun 1999. ITEP menyatakan tujuan khusus yang harus diselesaikan pada tahun 2005 yang mencakup fasilitas dan layanan. Fasilitas termasuk pemasangan komputer dan akses Internet di ruang kelas, serta konten pendidikan multimedia, sementara layanan termasuk program pelatihan guru untuk penggunaan TI, penelitian dan pengembangan untuk pengajaran menggunakan jaringan berkecepatan tinggi, dan penciptaan Institut Riset Kebijakan Pendidikan Nasional yaitu sebuah portal online untuk metode pengajaran.

Ketersediaan komputer dan Internet di sebagian besar ruang kelas umum saat ini menunjukkan bahwa komponen fasilitas rencana tersebut setidaknya berhasil sebagian. Namun secara umum, hal tersebut tidak terlaksana dengan baik karena hanya 29,2% ruang kelas sekolah negeri yang memenuhi tujuan tersebut. Selain itu, meskipun bertahun-tahun telah berlalu sejak tanggal yang dimaksudkan, komponen layanan rencana tersebut, yang mencakup skenario penggunaan aktual untuk fasilitas tersebut, tidak terealisasi.

Setelah ITEP, MEXT mengeluarkan "Rencana Reformasi Pendidikan untuk Abad ke-21", juga disebut sebagai "Rencana Pelangi", yang merupakan revisi menyeluruh atas tujuan dan tolok ukur

pendidikan. Tujuan dari Rencana Pelangi adalah untuk mendirikan 20 ruang kelas siswa dengan kursus yang berfokus pada TIK yang mana setengah dari jumlah yang sebenarnya ada pada saat itu. Namun, tidak ada petunjuk rinci yang diberikan mengenai penerapan Teknologi (Vallance, 2008). Sehubungan dengan rencana tersebut, Jepang memiliki inisiatif TIK lain yang lebih besar dengan proyeksi yang berani termasuk pendirian Kantor Pusat Strategis TI untuk Promosi Masyarakat Jaringan Informasi dan Telekomunikasi Tingkat Lanjut pada tahun 2001.

Pada tahun 2011, MEXT menerbitkan rencana dan visi baru untuk mengimplementasikan teknologi ke dalam sistem pendidikan publik dan saat ini sedang menjalani proyek baru bekerja sama dengan MIC. Sejak arah baru untuk implementasi kolaboratif antara MEXT dan MIC, banyak program percontohan telah menunjukkan hasil yang menjanjikan di Jepang seperti potensi buku teks digital dan pemanfaatan konten media untuk meningkatkan pemahaman di sekolah dasar (KODAIRA & WATANABE, 2013). Pada tahun 2014, MEXT dan MIC bekerja untuk memperkenalkan platform cloud yang terjangkau untuk pendidikan (MIC, 2016, p.78) dan pada tahun 2016, telah membuat kemajuan dalam proyek untuk incorporate cloud computing ke dalam sektor pendidikan (MIC, 2017, p.84).

Meskipun hampir satu dekade melakukan perencanaan ulang beberapa kali karena kegagalan untuk memenuhi tonggak penting, Jepang telah mampu menunjukkan pertumbuhan TIK yang kuat dan konsisten untuk program percontohan dalam pendidikan dari tahun 2011 dan berencana untuk menerapkan hasilnya ke dalam sistem pendidikan pada tahun 2020 (MIC, 2014 hal.7).

2. TIK untuk Pendidikan di Korea

Setelah menjabat pada tahun 1992, Presiden Kim Yong Sam mendirikan PCER, yang kemudian menjadi dasar Proposal Reformasi Pendidikan 31 Mei, juga dikenal sebagai ERP 5.31. Ini menandai awal transformasi demokrasi Korea (G.-J. Kim, 2002). Hal ini menjadi titik awal perubahan nyata dalam pendidikan dan pada tahun 1996 Korea mendirikan Korea Multimedia Education Center (KMEC) dan Korea Research Information Center (KRIC) bersama dengan EDUNET yang didirikan untuk menyediakan alat TIK ke sekolah dan pendidik dalam layanan jaringan yang komprehensif.

Karena awal masuknya ke dunia jaringan komputer, EDUNET berfungsi sebagai pusat online untuk karyawan pendidikan dan dengan cepat memantapkan dirinya sebagai sistem yang dihormati. Ini adalah momen krusial dalam garis waktu TIK Korea karena EDUNET nantinya akan menjadi fitur penting penggunaan TIK di sekolah-sekolah Korea pada abad kedua puluh satu (Hwang et al., 2010). KMEC dan KRIC bergabung untuk membentuk KERIS pada tahun 1999. Sejak saat itu, semua tugas terkait TIK untuk pendidikan yang akan datang telah dialihkan, ditunjuk, atau diberikan kepada KERIS,

menjadikannya organisasi pusat untuk mengawasi upaya TIK dalam pendidikan untuk Korea pada abad kedua puluh satu (Hwang et al., 2010).

Perlu dicatat bahwa penciptaan KERIS pada pergantian abad ke-20 adalah puncak dari rangkaian perubahan yang berlarut-larut yang telah dimulai hampir satu dekade sebelumnya dengan ERP 5.31. ERP 5.31 juga mencakup rencana anggaran untuk pelatihan guru dan fasilitas sekolah, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SMIS), yang terlihat dalam layanan seperti EDUNET, dan pembentukan organisasi untuk mengawasi tugas terkait TIK. Organisasi pengelola ini terwujud dengan berdirinya KERIS (G.-J. Kim, 2002). Sejak didirikan, KERIS terus berfungsi sebagai badan koordinasi pusat untuk tugas-tugas terkait TIK dalam pendidikan hingga saat ini dan telah aktif dalam penelitian dan pengembangan TIK di sekolah-sekolah Korea selama beberapa dekade sejak didirikan (Hwang et al., 2010). Kemajuan di Korea patut diperhatikan, bukan karena adanya rencana tetapi karena pelaksanaan jangka panjang dan konsistensi para pembuat keputusan dan koordinasi mereka dengan rencana induk.

B. Pembahasan Penyebab Divergensi

Jepang dan Korea memiliki rencana untuk TIK di sektor pendidikan publik. Namun seperti yang dibahas di bagian sebelumnya, Korea mulai mengembangkan dan menerapkan rencana tersebut ke dalam sistem lebih awal melalui ERP pada tahun 1992. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, pada akhir dekade tahun 1999 Jepang mengembangkan ITEP.

Keputusan politik oleh pemerintah Korea atau intervensi perusahaan bukanlah kekuatan pendorong utama untuk perubahan, melainkan berfungsi sebagai katalisator. Perubahan politik dan ekonomi tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perubahan, risiko, inovasi, dan penghancuran status quo. Persepsi ini berfungsi sebagai landasan untuk perubahan di berbagai bidang tata kelola termasuk sistem pendidikan.

Munculnya TIK untuk pendidikan kebetulan bertepatan dengan saat Korea membutuhkan perubahan dan bersedia berpisah dengan masa lalu. Oleh karena itu, meskipun kebijakan dan bisnis tidak mendorong pencapaian pengembangan TIK untuk pendidikan, sifat dasar reformasi dalam pemerintahan dan ekonomi mempengaruhi masyarakat untuk merangkul perubahan itu sendiri, bersedia mengambil risiko, dan menumbuhkan daya saing yang lebih tinggi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keadaan pikiran mempengaruhi perkembangan pesat dan keberhasilan rencana TIK selama tahun 1990-an dan awal 2000-an di Korea.

Jepang kemudian mulai merencanakan inisiatif untuk TIK dalam pendidikan menjelang akhir 1990-an, tetapi, seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, semua rencana dan inisiatif berumur pendek. Perbedaan terbesar antara Jepang dan Korea selama ini adalah kecepatan perubahan iklim politik

dan ekonomi, serta perkembangan krisis. Sementara lanskap politik dan ekonomi Korea sedang mengalami perubahan cepat dan krisis besar (S. Y. Kim, 2014), kekuatan politik di Jepang tetap terkonsolidasi dengan Partai Demokrat Liberal (LDP) selama beberapa dekade yang bersifat konservatif (Beauchamp, 1991). Selain itu, meskipun perubahan ekonomi besar terjadi saat regresi dimulai, hal itu lebih tidak kentara di Jepang dibandingkan dengan Korea (Obstfeld, 2010). Perbedaan lingkungan politik dan ekonomi antara kedua negara menghasilkan dua suasana sosial yang kontras antara Jepang dan Korea.

Perbedaan Iklim Politik

Politik pada 1990-an di Jepang dan Korea berpusat pada perubahan ekonomi dan berurusan dengan konsekuensi sosial dari perubahan tersebut. Namun, reaksinya berbeda.

Politik Jepang berubah sangat sedikit secara mendasar karena Partai Demokrat Liberal (LDP) melanjutkan dominasinya di kantor publik (Krauss & Pekkanen, 2018). Memiliki pengaruh utama kebijakan publik yang berasal dari LDP sejak dimulainya pemerintahan pascaperang, Jepang mengembangkan lanskap politik yang konservatif dan stabil seiring berlalunya waktu (Aspinall, 2001). Meskipun seiring berjalannya waktu, perubahan ekonomi diakui dan reformasi terus dilakukan (Okano et al., 1999), sikap pembuat keputusan dan penegak kebijakan jarang berubah. Dengan cara ini, pemerintah konservatif terus mempertahankan peran dominan dalam politik Jepang sepanjang abad ke-20 (Beauchamp, 1991).

Iklim politik ini dapat berkontribusi pada sikap konservatif terhadap perubahan kebijakan pendidikan pemerintah. Meskipun kepraktisan TIK diakui pada awal 1990-an, dibutuhkan waktu hampir satu dekade sebelum rencana pertama diselesaikan. Ada kemungkinan bahwa status quo lingkungan politik dan sifat konservatif partai yang berkuasa, menciptakan sistem pembuatan kebijakan di mana perubahan seperti TIK ditinjau tanpa tergesa-gesa, sehingga menghasilkan rencana yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terwujud.

Di sisi lain, pemerintah Korea mengalami perubahan dramatis dalam kekuasaan sebagai kepresidenan militer yang dimulai dengan kudeta Park Chung Hee dan berlanjut selama beberapa dekade hingga dua penerusnya, Presiden Chun Do Hwan dan Ro Tae Woo berakhir. Pada tahun 1993, penerus Ro Tae Woo, Kim Yong Sam, menjadi presiden Korea non-militer pertama dalam beberapa dekade. Kim memiliki sejarah antagonisme dengan pemerintahan sebelumnya dan menunjukkan perbedaan gaya kepemimpinan dibandingkan dengan presiden sebelumnya karena pemerintahannya menyebarkan berbagai kampanye untuk membentuk bentuk pemerintahan dan ekonomi baru yang akan melepaskan diri dari rezim sebelumnya (Graham, 2003).

Iklim politik tahun 1990-an di Korea sangat kontras dengan iklim Jepang karena perubahan radikal yang terjadi melalui peralihan rezim warisan Roh ke rezim penentang Kim. Banyak perubahan luas terjadi di sektor publik dengan pergantian kekuasaan ini dan sebagai akibatnya, kebijakan pendidikan juga terpengaruh. Karena arah pemerintahan baru bukan untuk menjadi konservatif, melainkan untuk membuat kemajuan yang terlihat setelah rezim baru, ada kemungkinan bahwa sumber daya dan insentif untuk memasukkan TIK ke dalam pendidikan lebih kuat di Korea dibandingkan dengan Jepang.

Perbedaan Iklim Ekonomi

Meskipun ekonomi menjadi masalah selama tahun 1990-an baik di Jepang maupun Korea, situasi Jepang jauh lebih halus dibandingkan dengan perubahan dramatis yang terjadi di Korea. Meskipun terjadi penurunan kemakmuran ekonomi yang dramatis dari tahun 1980-an, Jepang masih mengalami peningkatan PDB yang lambat selama ini dan proyeksi berlanjut pada tingkat 1 hingga 2,5 persen (Alexander, 2000)

Terlepas dari kenyataan bahwa pengangguran memang meningkat hingga 5%, angka itu tetap jauh lebih rendah daripada mayoritas ekonomi top dunia pada saat itu (Harari, 2013). Perubahan besar dalam sistem pendidikan Jepang yang sudah mapan dan birokratis tidak terpengaruh secara signifikan oleh pergeseran ekonomi ini. Ini mungkin terjadi sebagai akibat dari tidak adanya fitur yang akan memaksa perubahan. TIK diakui signifikan, tetapi prosedur perencanaannya memakan waktu lebih lama daripada di Korea.

Korea mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sebagai negara yang berorientasi ekspor, memiliki banyak karakteristik yang sama dengan paradigma bisnis Jepang (Graham, 2003). Namun, Korea menghadapi perjuangan ekonomi pada akhir 1990-an yang akan memiliki dampak nasional yang bertahan lama pada sikap dan gagasan rakyatnya.

Pada tahun 1997, terjadi krisis ekonomi parah yang melanda beberapa pasar Asia termasuk Korea, yang pada akhirnya membutuhkan bantuan dari IMF (IMF). Hal ini menyebabkan kegemparan nasional karena pemerintah dan media sangat menganjurkan untuk mendorong partisipasi sipil melalui perubahan gaya hidup dan pasar kerja untuk memulihkan ekonomi negara (S. Y. Kim, 2014).

Kegagalan perusahaan besar, pasar kerja, dan sistem keuangan memaksa orang untuk menerima perubahan dalam hidup mereka dan meninggalkan zona nyaman yang telah mereka bangun dari waktu ke waktu (Kihwan, 2006). Sementara perubahan manajemen dan tenaga kerja yang signifikan terjadi baik di sektor publik maupun swasta, dan layanan pemerintah elektronik mulai muncul sebagai bentuk pemerintahan yang lebih efisien, warga meninggalkan negara dengan pusaka keluarga untuk memberikan emas (S. Y. Kim, 2014).

Dengan demikian, banyak masyarakat Korea yang terkondisikan untuk menerima perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dan masyarakat. Penerimaan ini memfasilitasi perubahan agenda politik serta kebijakan pendidikan. Di garis depan perubahan yang terjadi dalam pendidikan adalah TIK. Oleh karena itu, sinergi pemerintahan baru dan perubahan ekonomi menciptakan iklim yang memfasilitasi perencanaan dan implementasi TIK berlangsung lebih awal dan cepat pada tahun 1990-an.

Efek Gabungan pada Masyarakat

Kemakmuran ekonomi tahun 1980-an berakhir dengan meledaknya gelembung ekonomi, dan perubahan dramatis dalam kemajuan ekonomi dilihat sebagai deflasi kronis yang menarik perhatian kepentingan keuangan di Jepang, yang menyebabkan tahun 1990-an sering disebut sebagai "dekade yang hilang" di Jepang (Nishizaki et al., 2013). Namun, sebagian besar institusi tetap sama. Terlepas dari banyak ide terkait teknologi yang diperdebatkan, pelestarian status quo masih menjadi prioritas utama di sekolah-sekolah Jepang, di mana tidak banyak yang berubah selama beberapa dekade. Perubahan nyata dalam kebijakan pendidikan, perubahan yang terjadi bersifat inkremental, yang membantu memastikan bahwa sebagian besar aspek dari masa lalu tetap ada (Schoppa, 2002).

Berbeda dengan Jepang, di mana perubahan lebih bertahap, pada 1990-an, masyarakat Korea mengalami pergolakan yang mendalam. Ide-ide baru dipandang layak, dan keyakinan konservatif dipertanyakan, sebagai akibat dari perubahan politik dan ekonomi radikal yang terjadi selama dekade tersebut. Teknologi dan kenyamanan dapat memacu inovasi dalam keadaan seperti itu karena TIK dipandang sebagai cara untuk mengatasi berbagai kritik berbasis kinerja dan sosial dari sistem pendidikan (H.-A. Kim, 2004). Oleh karena itu, dibandingkan dengan Jepang, mengintegrasikan teknologi ke dalam sekolah berjalan lebih lancar di Korea.

Implikasi

Dengan melihat secara mendalam kasus Korea, kita dapat melihat bahwa perubahan institusi tidak hanya berasal dari pembuatan kebijakan, tetapi dari kulminasi lanskap politik, pengaruh ekonomi, tren sosial, dan fungsi pemaksaan yang mendorong pengguna untuk beradaptasi dengan cara tertentu. Penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun memiliki akar dan proses perkembangan yang hampir sama, sistem pendidikan publik Jepang dan Korea menyimpang ke arah yang berbeda sebagai akibat dari puncak tersebut, serta pengenalan TIK ke dalam sistem pendidikan. Hal ini berimplikasi pada pengambil kebijakan dan tenaga kependidikan bahwa metode penerapan teknologi dapat mengubah arah pembangunan pendidikan. Hanya dalam waktu lebih dari satu dekade selama tahun 1990-an, sistem pendidikan publik Korea telah berkembang sangat berbeda dari Jepang yang dulunya serupa.

Teknologi memiliki kemampuan untuk mengubah cara orang memandang realitas serta cara mereka mengelola dan melaksanakan tugas (Fogg, 2002). Sementara itu, pendidikan memiliki potensi untuk membentuk pemikir masa depan menuju pembangunan masyarakat yang baik dan kebebasan berkreasi. Untuk terus menyukseskan pendidikan publik, masa depan mungkin memiliki kemajuan tambahan yang memerlukan penggunaan TIK. Penelitian ini menemukan bahwa lingkungan sosial dan kemauan masyarakat untuk berubah dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat integrasi teknologi ke dalam sistem pendidikan publik. Akibatnya, daripada hanya berfokus pada manfaat dan potensi TIK, pembuat kebijakan dan cendekiawan harus menginvestasikan waktu dan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perspektif sosial secara keseluruhan untuk menumbuhkan penerimaan yang lebih besar oleh pengguna.

4. KESIMPULAN

Jepang dan Korea tidak hanya dekat secara geografis, tetapi melalui sejarah panjang pertukaran budaya, pengaruh kolonialisme, dan modernisasi pemerintahan, kedua negara telah menjalin hubungan persaingan dan kerja sama yang berkelanjutan. Meskipun hubungan pascaperang menjadi rumit antara kedua negara selama pertengahan abad ke-20, sistem pendidikan Jepang dan Korea dan banyak bidang masyarakat yang dihasilkan dari pendidikan semacam itu tetap sama satu sama lain selama beberapa dekade. Namun, terlepas dari kesamaan tersebut, sistem pendidikan mulai beralih ke arah yang berbeda melalui munculnya TIK dan rangkaian peristiwa yang kontras yang terjadi pada tahun 1990-an dalam iklim politik dan ekonomi kedua negara, diikuti oleh dampak peristiwa tersebut di masyarakat.

5. REFERENSI

- Alexander, A. (2000). What Happened to Japan's Economy in the 1990s? *Japan Economic Institute Report A*, 27, 1–12.
- Aspinall, R. W. (2001). *Teachers' unions and the politics of education in Japan*. SUNY Press.
- Beauchamp, E. R. (1991). *Education Reform in Japan: A Case of Immobilist Politics*. JSTOR.
- Bjork, C., & Tsuneyoshi, R. (2005). Education reform in Japan: Competing visions for the future. *Phi Delta Kappan*, 86(8), 619–626.
- Dimiyati, M. (1988). Landasan Kependidikan: Suatu Pengantar Pemikiran Keilmuan tentang Kegiatan Pendidikan. *Jakarta: Dirjendikti, P2LPTK*.
- Elwood, J., & MacLean, G. (2009). ICT Usage and Student Perceptions in Cambodia and Japan. *International Journal of Emerging Technologies & Society*, 7(2).

- Fogg, B. J. (2002). Persuasive technology: using computers to change what we think and do. *Ubiquity*, 2002(December), 2.
- Fujita, H. (2000). Education reform and education politics in Japan. *The American Sociologist*, 31(3), 42–57.
- Graham, E. M. (2003). Reforming Korea's industrial conglomerates. *Peterson Institute Press: All Books*.
- Harari, D. (2013). Japan's Economy: from the 'Lost Decade' to Abenomics. *House of Commons Library, Standard Note SN06629*. London: Oct, 24.
- Hood, C. P. (2003). *Japanese education reform: Nakasone's legacy*. Routledge.
- Kim, G.-J. (2002). Education policies and reform in South Korea. *Secondary Education in Africa: Strategies for Renewal*, 29–39.
- Kim, H.-A. (2004). *Korea's Development under Park Chung Hee*. Routledge.
- Kim, S. Y. (2014). South Korea's policy responses to global economic crisis. *Proceedings of the First Middle East Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking*, 1–27.
- KODAIRA, S. I., & WATANABE, S. (2013). *The diversifying media environment of Japanese classrooms and educational content*. Tokyo, Japan: NHK Broadcasting Culture Research Institute.
- Kozma, R. B. (2008). Comparative analysis of policies for ICT in education. *International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education*, 1083–1096.
- Krauss, E. S., & Pekkanen, R. J. (2018). The rise and fall of Japan's Liberal Democratic Party. In *Critical Readings on the Liberal Democratic Party in Japan* (pp. 1145–1156). Brill.
- Kusano, K., Frederiksen, S., Jones, L., Kobayashi, M., Mukoyama, Y., Yamagishi, T., Sadaki, K., & Ishizuka, H. (2013). The effects of ICT environment on teachers' attitudes and technology integration in Japan and the US. *Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice*, 12(1), 29–43.
- Lee, Y., & Yi, Y. (2000). *Modern education, textbooks and the image of the nation: Politics of modernization and nationalism in Korean education, 1880-1910*. Routledge.
- Mason, E. S., Kim, M. J., Perkins, D. H., Kim, K. S., & Cole, D. C. (1989). Modernization in the Third World and in Korea. In *The economic and social modernization of the Republic of Korea* (pp. 30–57). Harvard University Asia Center.
- McGinn, N. F., Snodgrass, D. R., Kim, Y. B., Kim, S.-B., & Kim, Q.-Y. (1980). Education and the Development of Korea. In *Education and Development in Korea* (pp. 218–241). Harvard University Asia Center.
- Naruki Osugi. (2005). Perbandingan informatisasi pendidikan dalam pendidikan khusus di Jepang dan Korea. *Jurnal Masyarakat Jepang Untuk Teknologi Pendidikan*, 28(suppl), 205–208.
- Nishizaki, K., Sekine, T., Ueno, Y., & Kawai, Y. (2013). Chronic deflation in Japan. *Andrew Filardo and Aaron Mehrotra*, 1.
- Obstfeld, M. (2010). *Time of Troubles: The Yen and Japan's Economy, 1985–2008*. Published in *In Koichi Hamada, Anil Kashyap, and David Weinstein (eds.), Japan's Bubble, Deflation, and Long-Term Stagnation*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Okano, K., Oprandy, R., & Tsuchiya, M. (1999). *Education in contemporary Japan: Inequality and diversity*. Cambridge University Press.
- Putra, A. (2017). *Mengkaji dan Membandingkan Kurikulum 7 Negara (Malaysia, Singapura, Cina, Korea, Jepang, Amerika dan Finlandia)*.
- Ragin, C. C. (2014). *The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies*. Univ of California Press.
- Rha, I., & Yoshida, A. (2005). A comparative study on ICT policy in education in Korea and Japan. *Educational Technology International*, 6(1), 3–39.
- Riyana, C. (2008). Studi Perbandingan Kurikulum: Cina, Korea dan Jepang. *Makalah Studi Perbandingan Kurikulum Prodi S3 Pengembangan Kurikulum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Roh, Y.-R. (2004). Democratic citizenship education in the information age: a comparative study of South Korea and Australia. *Asia Pacific Education Review*, 5, 167–177.
- Sánchez, J., Salinas, Á., & Harris, J. (2011). Education with Ict in South Korea and Chile. *International Journal of Educational Development*, 31(2), 126–148.
- Schoppa, L. J. (2002). *Education reform in Japan: A case of immobilist politics*. Routledge.
- Seth, M. J. (2002). 6 The Costs of Educational Zeal. In *Education Fever* (pp. 172–191). University of Hawaii Press.
- Shibata, M. (2004). *Educational borrowing in Japan in the Meiji and post-war eras*. na.
- Shobahiya, M. (2008). *Sistem Pendidikan (Studi Komparasi antara Indonesia dan Jepang)*.
- Taufiqurakhman, B. (2014). Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. *Jakarta: Pers*.
- Vallance, M. (2008). Beyond policy: Strategic actions to support ICT integration in Japanese schools. *Australasian Journal of Educational Technology*, 24(3).